

ANALISIS PENGELOLAAN SEDIAAN FARMASI DI PUSKESMAS BITUNG BARAT KOTA BITUNG

Gabriella Windy Najohan*, Ardiansa A.T. Tucunan*, Febi K. Kolibu*

* Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado

ABSTRAK

Pengelolaan sediaan farmasi di Puskesmas meliputi perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari penelitian ini secara umum untuk mengetahui mekanisme pengelolaan sediaan farmasi di Puskesmas Bitung Barat Kota Bitung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Informasi dikumpulkan dari 5 orang informan yang terlibat dalam Pengelolaan Sediaan Farmasi di Puskesmas dengan menggunakan metode Triangulasi. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, alat perekam suara, dan alat tulis menulis. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dokumen-dokumen yang diperlukan dan data primer yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan informan yakni wawancara mendalam. Perencanaan dan permintaan sediaan farmasi dilakukan berdasarkan laporan yang telah dibuat setiap bulannya, penerimaan sediaan farmasi dilihat dari kuantitasnya tidak selalu diterima sesuai dengan permintaan Puskesmas ke gudang farmasi Dinas Kesehatan, dalam penyimpanan sediaan farmasi dilakukan dengan menggunakan sistem FEFO, pendistribusian dilakukan oleh Puskesmas ke jaringan-jaringan dan ke sub-sub unit yang ada, pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi belum pernah dilaksanakan di Puskesmas, pengendalian dilakukan sesuai dengan pedoman, pencatatan dan pelaporan juga dilakukan dengan baik di Puskesmas sesuai dengan pedoman, pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Puskesmas dan juga dari Dinas Kesehatan yaitu pada kegiatan monev. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu didapatkan bahwa Pengelolaan Sediaan Farmasi di Puskesmas Bitung Barat sudah dilakukan dengan baik namun memang sumber daya manusia di bagian kefarmasian Puskesmas masih kurang dan hal tersebut sering membuat tenaga yang ada kewalahan dalam proses pengelolaan tersebut.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Sediaan Farmasi, Puskesmas*

ABSTRACT

Management of pharmaceutical preparations at the health center includes planning, demand, receiving, storing, distributing, destroying, withdrawing, controlling, recording, reporting, monitoring, and evaluation. The purpose of this research is to determine the mechanism of management of pharmaceutical preparations in the West Bitung Health Center in the City of Bitung. The research method used in this research is qualitative. Information was collected from five informants who were involved in the Management of Pharmaceutical Preparations at the health center by using a triangulation method. The instruments in this research are interview guides, voice recording devices, and stationery. The Data collection was carried out by collecting secondary data in the form of the required documents and primary data conducted by direct in-depth interviews with the informants. The planning and demand for pharmaceutical preparations is carried out based on the LPLPO that has been made every month. Reception of pharmaceutical preparations in terms of quantity is not always accepted in accordance with the request of the health centre to the pharmacy warehouse of the Health Department. Storage of pharmaceutical preparations is carried out using the FEFO system. The distribution is done by health center to the networks and to the sub-units whose exist. Destroying and withdrawing of pharmaceutical preparations not yet has been carried out at the health centre. The control was carried out according to the guidelines. Recording and reporting is also done well at the health centre according to the guidelines and also monitoring and evaluation is carried out well by the health centre and from the Health Department in the monitoring and evaluation activity. The results obtained are the Management of Pharmaceutical Preparations in West Bitung Health Center has been done well, but the human resources in the pharmacy department are still lacking and this often makes the existing personnel overwhelmed in the management process.

Keywords: *Management, Pharmaceutical Supply, Health Center*

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya yang dapat dilaksanakan sendiri ataupun secara bersamaan dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat (Azwar, 2010).

Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan (Permenkes RI, 2016).

Puskesmas Bitung Barat merupakan salah satu puskesmas yang terakreditasi dan memiliki wilayah kerja yang luas yang harus memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pasien. Dari hasil observasi dan pengambilan data awal yang dilakukan oleh peneliti, Puskesmas Bitung Barat melakukan penyediaan 354 jenis obat untuk pasien umum dan 157 jenis obat untuk pasien JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di sepanjang tahun 2018 dengan bervariasinya kuantitas di setiap jenis obat yang disediakan. Dari hasil wawancara singkat dengan kepala puskesmas Bitung Barat pada saat pengambilan data awal bahwa diantara banyaknya tenaga kesehatan yang ada di puskesmas tersebut hanya terdapat 1 tenaga apoteker dan bukan merupakan penanggung jawab gudang obat, dan dari wawancara singkat dengan

penanggung jawab gudang obat Puskesmas Bitung Barat bahwa selama ini memang belum pernah terjadi kekosongan obat di puskesmas tersebut.

Puskesmas Bitung Barat yang memiliki wilayah kerja yang sangat luas dengan banyaknya kunjungan pasien harus melakukan pengelolaan sediaan farmasi yang tepat sesuai dengan kunjungan dan kebutuhan pasien untuk menunjang pelayanan kesehatan yang baik di puskesmas tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016 bahwa salah satu tujuan Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas yaitu melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Karena dengan melakukan pengelolaan yang baik dan dengan sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas maka dapat memberikan pelayanan farmasi yang baik bagi pasien. Dari uraian latar belakang, penulis tertarik untuk menganalisis Pengelolaan Sediaan Farmasi di Puskesmas Bitung Barat Kota Bitung.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme pengelolaan sediaan farmasi di Puskesmas Bitung Barat Kota Bitung.

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Bitung Barat Kecamatan Maesa Kota Bitung dan dilaksanakan pada bulan Juni 2019 s/d Agustus 2019. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Puskesmas Bitung Barat, Penanggung Jawab Gudang Obat Puskesmas Bitung Barat, Penanggung Jawab Apotek Puskesmas Bitung Barat, Pelaksana Instalasi Farmasi Puskesmas Bitung Barat, dan Kasubag Informasi, Data, dan Humas Dinas Kesehatan Kota Bitung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Sediaan Farmasi

Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyusun daftar kebutuhan sediaan farmasi yang berkaitan dengan suatu pedoman atas dasar konsep kegiatan yang sistematis dengan urutan yang logis dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. (Oschar dan Jauhar, 2016).

Perencanaan kebutuhan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Puskesmas Bitung Barat yaitu dengan memperkirakan kebutuhan dan mempertimbangkan penggunaan sediaan farmasi sebelumnya, berdasarkan wawancara mendalam (*indepth interview*) perencanaan hanya dilakukan untuk memenuhi salah satu tujuan perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dalam Permenkes No. 74 Tahun 2016 namun berdasarkan hasil observasi

langsung dan telaah dokumen yang dilakukan bahwa sebenarnya mereka sudah melakukan perencanaan sesuai dengan aturan kefarmasian hanya mungkin tidak mengetahui bahwa perencanaan yang dilakukan sudah merujuk pada ketiga tujuan tersebut.

Puskesmas Bitung Barat dalam melakukan proses perencanaan kebutuhan sediaan farmasi memberikan tanggung jawab penuh kepada petugas kesehatan di Instalasi Farmasi dalam melakukan proses perencanaan tersebut. Perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dilakukan berdasarkan LPLPO yang telah dibuat.

Metode yang biasa digunakan dalam perhitungan kebutuhan obat yaitu metode konsumsi dan morbiditas. (Oschar dan Jauhar, 2016)

Puskesmas Bitung Barat melakukan perencanaan kebutuhan obat dengan menggunakan metode konsumsi yaitu melihat berapa banyak konsumen menggunakan obat tersebut tetapi juga menggunakan metode morbiditas yaitu dengan melihat berapa banyak kunjungan pasien dan mempertimbangkan kejadian penyakit yang umum terjadi. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan di Puskesmas Bitung Barat, penelitian yang dilakukan oleh Kobandaha, dkk (2016) mengenai perencanaan kebutuhan obat bahwa tidak ada perencanaan khusus,

hanya sesuai dengan perkiraan apabila obat habis, petugas langsung meminta di Gudang Obat Dinas Kesehatan Kota Manado.

Permintaan Sediaan Farmasi

Hasil wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumen didapatkan bahwa Puskesmas Bitung Barat dalam melakukan proses permintaan sediaan farmasi dilakukan oleh kepala gudang obat berdasarkan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dengan memperhatikan jumlah sediaan farmasi yang akan diadakan dengan melihat jumlah kebutuhan dan pemakaian obat pada bulan sebelumnya, tetapi juga memperhatikan jumlah jenis penyakit yang menjadi prioritas atau terbanyak selanjutnya diajukan kepada gudang farmasi Dinas Kesehatan Kota Bitung.

Penelitian yang dilakukan oleh Mailoor, dkk (2017) didapatkan bahwa proses permintaan obat di Puskesmas Danowudu dilakukan oleh kepala gudang obat. Prosedur permintaan obat yang ada di Puskesmas Danowudu dilakukan dengan menyusun perencanaan kebutuhan obat melalui LPLPO dengan memperhatikan jumlah resep yang ada, jumlah kebutuhan obat pada bulan sebelumnya, serta jumlah penyakit terbanyak kemudian diajukan ke gudang farmasi Dinas Kesehatan

Kota Bitung.

Hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Bitung Barat tentang sediaan farmasi mengenai proses permintaan yang dilakukan ke Dinas Kesehatan Kota mempunyai kesamaan dengan hasil penelitian mengenai proses permintaan obat yang dilakukan di Puskesmas Danowudu Kota Bitung.

Penerimaan Sediaan Farmasi

Penerimaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai adalah suatu kegiatan dalam menerima Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota atau hasil pengadaan Puskesmas secara mandiri sesuai dengan permintaan yang telah diajukan (Permenkes RI, 2016).

Hasil wawancara mendalam dan observasi langsung didapatkan bahwa Puskesmas Bitung Barat melakukan proses penerimaan berdasarkan permintaan yang telah diajukan ke Dinas Kesehatan Kota, kemudian diterima di gudang obat Puskesmas dan dilakukan pemeriksaan terhadap jumlah dan jenis sediaan farmasi, bentuk yang disesuaikan dengan LPLPO, tetapi juga dilihat tanggal kadaluwarsa dan syarat-syarat penyimpanan obat tersebut. Dalam proses penerimaan sediaan farmasi tersebut memang tidak selalu diterima sesuai dengan kuantitas sediaan farmasi yang diajukan oleh Puskesmas,

hal tersebut disebabkan karena banyaknya permintaan dari puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Bitung dan kurangnya ketersediaan kuantitas sediaan farmasi di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota. Petugas kesehatan di instalasi farmasi sangat berperan penting dan diberi tanggung jawab oleh kepala puskesmas untuk melakukan proses penerimaan sediaan farmasi. Penelitian yang dilakukan oleh Muthahara, dkk (2018) di Puskesmas Kamonji Kecamatan Palu Barat didapatkan bahwa penerimaan dan pemeriksaan obat yang dilakukan di Puskesmas dilaksanakan oleh petugas pengelolaan obat. Pengelolaan obat di Puskesmas Kamonji menunjukkan bahwa setelah petugas menerima obat dari gudang farmasi, dilakukan pengecekan kembali apakah obat sudah sesuai dengan jenis dan jumlah yang diminta dalam LPLPO.

Penyimpanan Sediaan Farmasi

Hasil wawancara mendalam, observasi langsung serta studi dokumen yang dilakukan di Puskesmas Bitung Barat didapatkan bahwa Puskesmas sudah melakukan penyimpanan sesuai dengan standar yang ada. Hasil dari wawancara mendalam dengan I3 bahwa obat-obat disimpan dalam rak yang berbeda, kalau tablet disimpan pada lemari, obat injeksi disimpan pada penyimpanan obat

injeksi, narkotika disimpan pada lemari penyimpanan narkotika dan obat-obat tersebut disusun menggunakan sistem alphabet atau berdasarkan abjad. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari I1 dan I2 mengenai tempat penyimpanan sediaan farmasi di Puskesmas Bitung Barat dan didukung juga dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Muthahara, dkk (2018) di Puskesmas Kamonji Kecamatan Palu Barat juga memiliki hasil yang sama dengan hasil penelitian proses penyimpanan obat di Puskesmas Bitung Barat yaitu penyimpanan obat di Puskesmas Kamonji sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara dan observasi langsung di gudang obat atau tempat penyimpanan obat di Puskesmas Bitung Barat didapatkan bahwa Puskesmas menerapkan sistem FIFO dan FEFO akan tetapi Puskesmas Bitung Barat lebih banyak menerapkan sistem FEFO dalam proses penyimpanan sediaan farmasi.

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai sistem penyimpanan sediaan farmasi di Puskesmas Bitung Barat mempunyai kesamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hiborang, dkk (2016) di Puskesmas Paniki Bawah Kota Manado yaitu

menggunakan sistem FEFO. Hasil penelitian tersebut jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoiruriza, dkk (2017) mengenai sistem penyimpanan obat didapatkan bahwa Puskesmas Teling Atas sudah menerapkan sistem FIFO dan FEFO.

Pendistribusian Sediaan Farmasi

Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam melakukan pengeluaran dan pengiriman obat-obat yang bermutu, terjamin keabsahan serta tepat jenis dan jumlah dari gudang obat secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan unit-unit pelayanan kesehatan (Tim MGPM Pati, 2015).

Pendistribusian sediaan farmasi yang dilakukan oleh Puskesmas Bitung Barat terbagi 2 yaitu didistribusikan ke sub unit dan ke jaringan Puskesmas. Pendistribusian yang dilakukan untuk sub unit pelayanan kesehatan yaitu ruang rawat inap, UGD, dan lain-lain dilakukan atas permintaan dari sub-sub unit tersebut dengan melakukan anfrak kebutuhan obat ke apotek Puskesmas Bitung Barat sesuai dengan yang dibutuhkan, sedangkan pendistribusian yang dilakukan untuk jaringan Puskesmas yaitu Pustu, Polindes, Pusling, dll, dilakukan atas permintaan dari jaringan-jaringan pelayanan kesehatan tersebut berdasarkan laporan permintaan obat LPLPO yang mereka

masukkan ke gudang obat Puskesmas Bitung Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Muthahara, dkk (2018) mengenai pendistribusian obat didapatkan bahwa pendistribusian obat sudah dilakukan sesuai prosedur, namun terjadinya kekosongan obat di Puskesmas Kamonji bukan karena proses pengelolaan obat yang tidak sesuai dengan prosedur tetapi karena obat yang diminta tidak sesuai dengan yang diterima dari Dinas Kesehatan. Jika dibandingkan dengan hasil wawancara dan observasi langsung di Puskesmas Bitung Barat, didapatkan bahwa memang pihak Dinas Kesehatan tidak selalu dapat memberikan kebutuhan obat sesuai dengan permintaan LPLPO dari Puskesmas dikarenakan ketersediaan obat terbatas dan dengan banyaknya puskesmas yang ada, oleh karena itu Puskesmas Bitung Barat selalu mengantisipasi kekosongan obat dengan membeli kebutuhan obat ke instansi lain misalnya yang pernah dilakukan yaitu membeli ke Rumah Sakit Budimulia Bitung, agar supaya selain terhindar dari kekosongan obat, Puskesmas juga dapat melakukan pendistribusian ke sub-sub unit pelayanan kesehatan dan jaringan yang ada di Puskesmas Bitung Barat.

Pemusnahan dan Penarikan Sediaan Farmasi

Hasil dari wawancara dan observasi langsung didapatkan bahwa di Puskesmas Bitung Barat belum pernah dilakukan pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, dan berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan I3 bahwa jika nanti didapati ada sediaan farmasi yang harus dimusnahkan atau ditarik pasti pihak Dinas Kesehatan yang akan turun tangan langsung dalam menangani hal tersebut.

Hasil penelitian ini sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mailoor, dkk (2017) di Puskesmas Danowudu Kota Bitung bahwa puskesmas tidak pernah melakukan pemusnahan atau bisa dikatakan tidak dapat melakukan pemusnahan dengan sendirinya karena jika puskesmas ingin melakukan pemusnahan itu harus sesuai dengan prosedur. Menurut Permenkes, pemusnahan obat yang tidak dapat dipakai harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan obat dilakukan bila: produk tidak memenuhi persyaratan mutu, telah kadaluwarsa, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan.

Pengendalian Sediaan Farmasi

Hasil dari wawancara mendalam, observasi langsung serta studi dokumen yang dilakukan di Puskesmas Bitung Barat, pengendalian yang dilakukan oleh puskesmas yaitu dilakukan oleh tenaga kesehatan di bidang kefarmasian baik kepala gudang obat maupun penanggung jawab apotek (apoteker). Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan informan II yang menyatakan bahwa pengendalian sediaan farmasi di Puskesmas Bitung Barat dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Mailoor, dkk (2017) yang dilakukan di Puskesmas Danowudu, pengendalian persediaan obat di Puskesmas Danowudu dilakukan oleh kepala gudang obat di puskesmas, dari hasil penelitian yang dilakukan, informan menjawab pengendalian tergantung pada stok obat yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat dilihat tidak ada strategi yang baik dalam pengendalian persediaan obat, kepala gudang hanya melebih-lebihkan permintaan obat dalam melakukan permintaan obat yang diajukan kepada Dinas Kesehatan agar obat tetap tersedia di Puskesmas.

Pencatatan dan Pelaporan Sediaan Farmasi

Hasil dari wawancara mendalam, observasi langsung serta studi dokumen didapatkan bahwa Puskesmas Bitung Barat melakukan pencatatan dan pelaporan lewat pencatatan stok obat, pencatatan masuk dan keluarnya obat, dan laporan pemakaian dan lembar permintaan obat (LPLPO) yang dicatat setiap hari dan setiap bulan untuk dilaporkan dalam bentuk LPLPO, hal tersebut nantinya diperuntukkan dalam kelengkapan administrasi Puskesmas dan merupakan bukti bahwa pengelolaan sediaan farmasi telah dilakukan oleh Puskesmas, sebagai sumber data dalam melakukan pengaturan dan pengendalian, tetapi juga sebagai sumber data untuk melakukan pembuatan laporan, dan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi penggunaan sediaan farmasi di Puskesmas yang nantinya dipergunakan dalam perencanaan pada bulan berikutnya.

Hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh Puskesmas Bitung Barat sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Permenkes. Penelitian tersebut sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muthahara, dkk (2018) yang dilakukan di Puskesmas Kamonji bahwa kegiatan yang dilakukan pada

setiap proses pengelolaan obat di puskesmas yaitu pencatatan dan pelaporan berupa arsip-arsip/buku catatan yang digunakan dalam proses pengelolaan obat kemudian dilaporkan kepada pemegang program di Puskesmas Kamonji dan semua kegiatan asisten apoteker mulai dari pencatatan buku harian obat, dilaporkan kepada kepala penanggung jawab apoteker. (kurangi)

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mailoor, dkk (2017) mengatakan bahwa pencatatan dan pelaporan di Puskesmas sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Permenkes. Pencatatan dan pelaporan dibuat setiap bulannya oleh kepala gudang obat di Puskesmas dan kepala gudang yang bertanggung jawab agar supaya dapat terlaksananya pencatatan dan pelaporan obat yang tertib dan lengkap di Puskesmas Danowudu.

Pemantauan dan Evaluasi Sediaan Farmasi

Hasil dari wawancara mendalam yang dilakukan di Puskesmas Bitung Barat, didapatkan pernyataan dari beberapa informan yang ada di Puskesmas bahwa pemantauan atau penilaian terhadap pengelolaan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Puskesmas dinilai oleh Kepala Puskesmas, sedangkan pernyataan dari Kepala Puskesmas

mengenai pemantauan dan evaluasi yaitu ada yang dilakukan interen dari Puskesmas dan ada yang langsung dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya pernyataan dari pihak Dinas Kesehatan Kota Bitung yang mengatakan bahwa mereka melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai pengelolaan sediaan farmasi di puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Bitung lewat kegiatan monev.

Berdasarkan hasil observasi dan studi dokumen yang dilakukan di Puskesmas Bitung Barat didapatkan bahwa Puskesmas melakukan pemantauan dan evaluasi menggunakan kartu stok, buku catatan pengeluaran obat, buku catatan mutasi obat, dan didapati bahwa dokumen-dokumen tersebut tersedia dan lengkap.

KESIMPULAN

1. Perencanaan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Puskesmas Bitung Barat sudah sesuai dengan Permenkes No. 74 Tahun 2016.
2. Permintaan kebutuhan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Puskesmas sudah sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan dengan memasukkan laporan permintaan ke Dinas Kesehatan dalam bentuk LPLPO.
3. Penerimaan sediaan farmasi di

Puskesmas belum sesuai dengan permintaan yang diajukan ke Dinas Kesehatan, hal tersebut disebabkan karena kurangnya kuantitas dari sediaan farmasi yang tersedia di Dinas Kesehatan Kota Bitung.

4. Penyimpanan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Puskesmas sudah sesuai dengan Permenkes No. 74 Tahun 2016.
5. Pendistribusian sediaan farmasi yang dilakukan oleh Puskesmas sudah sesuai dengan aturan kefarmasian.
6. Puskesmas Bitung Barat belum pernah melakukan proses pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi.
7. Pengendalian sediaan farmasi yang dilakukan oleh Puskesmas sudah sesuai dan terkendali.
8. Pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh Puskesmas sudah sesuai dengan aturan kefarmasian.
9. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Puskesmas sudah berjalan dengan baik dan dilakukan oleh tenaga kefarmasian, kepala puskesmas dan oleh pihak Dinas Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, A. 2010. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Edisi Ketiga. Tangerang Selatan: Binarupa Aksara Publisher.

- Hiborang, S. S., Maramis, F. R., & Kandou, G. D. (2016). Gambaran Pelaksanaan Pengelolaan Obat Di Puskesmas Paniki Bawah Kota Manado Tahun 2016. *ikmas*, 1(3). <http://ejournalhealth.com/index.php/ikmas/article/view/70>. (diakses pada 28 Juli 2019 pukul 19:00 wita)
- Khoirurizza, M., Mandagi, C. K., & Kolibu, F. K. (2019). Analisis Proses Penyimpanan Obat Di Puskesmas Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado. *KESMAS*, 6(4). <https://ejournalhealth.com/index.php/kesmas/article/download/514/502> (diakses pada 14 Juli 2019 pukul 18:00 wita)
- Kobandaha, F., Kolibu F. K., & Tucunan, A. A. T. (2017). Analisis Manajemen Pengelolaan Obat Di Puskesmas Wenang Kota Manado. <http://medkesfkm.unsrat.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/Fikri-Kobandaha.pdf>. (diakses pada 28 Juli 2019 pukul 19:30 wita)
- Mailoor, R. J., Maramis, F. R., & Mandagi, C. K. (2017). Analisis Pengelolaan Obat Di Puskesmas Danowudu Kota Bitung. *Kesmas*, 6(3). <file:///C:/Users/user/Downloads/459-898-1-SM.pdf>. (diakses pada 12 April 2019 pukul 14:00 wita)
- Mamahit, D. I., Rumayar, A. A., & Kawatu, P. A. (2017). Analisis Proses Penyimpanan Obat Di Puskesmas Pingkan Tenga Kecamatan Tenga. *Media Kesehatan*, 9(3). <http://ejournalhealth.com/index.php/medkes/article/view/319> (diakses pada 12 Juli 2019 pukul 10:00 wita)
- Muthahara, M., Sakung, J., & Andri, M. (2018). Analisis Sistem Pengelolaan Obat Di Puskesmas Kamonji Kecamatan Palu Barat. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1(1). <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/jom/article/viewFile/411/298> (diakses pada 14 Juli 2019 pukul 18:30 wita)
- Oschar, L., Mohammad J. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen Farmasi. Country of Manufacture Indonesia: Prestasi Puskakarya.*
- Permenkes RI. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 74 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta: Menteri Kesehatan RI.
- Permenkes RI. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 75 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Menteri Kesehatan RI.
- Tim MGPM Pati, 2015. *Administrasi Farmasi Jilid 3*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).